

OPTIMALISASI PROBITY DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA POLDA JATIM MELALUI APLIKASI PUSKEU POLRI UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAPORAN

Safira Rizki Agustin¹, Hastanti Agustin Rahayu^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : safiraagustin410@gmail.com¹, hastanti.rahayu@uinsa.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi probity dalam pengadaan barang dan jasa di Polda Jatim melalui aplikasi Puskeu Polri dan dampaknya terhadap akuntabilitas pelaporan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan stakeholder, dan observasi langsung dalam proses pengadaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip probity, seperti transparansi dan akuntabilitas, telah meningkat berkat dukungan dari aplikasi Puskeu Polri. Meskipun demikian, tantangan teknis serta kebutuhan pelatihan bagi pengguna masih perlu diperhatikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara penggunaan aplikasi dan peningkatan akuntabilitas pelaporan dalam pengadaan. Disarankan agar Polda Jatim meningkatkan pelatihan, memperbaiki infrastruktur teknologi, serta melakukan evaluasi berkala untuk mendukung praktik pengadaan yang lebih efisien dan transparan.

Kata Kunci : Probitiy, Akuntabilitas, Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of probity in the procurement of goods and services in the East Java Regional Police through the Puskeu Polri application and its impact on reporting accountability. The research method used is qualitative with a case study approach. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, and direct observation in the procurement process. The findings of the study show that the application of probity principles, such as transparency and accountability, has increased thanks to the support of the Puskeu Polri application. However, technical challenges and training needs for users still need to be considered. This study concludes that there is a positive relationship between the use of applications and increased reporting accountability in procurement. It is recommended that the East Java Regional Police improve training, improve technological infrastructure,

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and conduct periodic evaluations to support more efficient and transparent procurement practices.

Keywords: *Probity, Accountability, Procurement of Goods and Services*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya di institusi pemerintahan. Proses pengadaan yang baik dan benar tidak hanya berpengaruh pada efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan proses yang transparan, akuntabel, dan adil. Salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pengadaan adalah probity, yang merujuk pada integritas dan etika dalam pelaksanaan pengadaan (Iskandar, 2023). Penerapan prinsip probity sangat penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Polda Jatim, sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengendalikan keamanan, membutuhkan sistem pengadaan yang efektif dan efisien untuk mendukung operasionalnya (Ardiyanti et al, 2016). Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berkaitan dengan pembelian peralatan dan perlengkapan, tetapi juga mencakup penyediaan layanan yang mendukung tugas dan fungsi kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi Polda Jatim untuk memiliki mekanisme pengadaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip probity (Hariri & Stansyah, 2023).

Dalam era digital saat ini, aplikasi teknologi informasi seperti Puskeu Polri menjadi sarana vital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa. Puskeu Polri dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pengadaan di lingkungan Polri, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Ardiyanti et al, 2016). Aplikasi ini diharapkan dapat menyediakan dokumentasi yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap tahap dalam proses pengadaan dapat dipantau dan dievaluasi dengan lebih baik. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, risiko penyimpangan dalam proses pengadaan dapat diminimalisir, dan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Optimalisasi penggunaan aplikasi Puskeu Polri diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pelaporan dalam pengadaan barang dan jasa di Polda Jatim. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Polda Jatim dapat melakukan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, serta memudahkan akses informasi bagi para pemangku kepentingan (Ardiyanti et al, 2016). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

TINJAUAN PUSTAKA

Probity adalah prinsip fundamental yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor publik. Dalam konteks ini, probity merujuk pada integritas, transparansi, dan kejujuran dalam setiap langkah proses pengadaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan diambil dengan penuh tanggung jawab dan etika. Di era di mana kepercayaan publik sangat dibutuhkan, penerapan probity menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan yang baik dalam pengadaan sumber daya publik (Gazali et al, 2024).

Salah satu aspek utama dari probity adalah transparansi. Ini berarti bahwa semua tahapan dalam proses pengadaan harus terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Ketika informasi mengenai pengadaan disajikan secara jelas, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai keputusan serta langkah-langkah yang diambil oleh institusi pemerintah. Ini pada gilirannya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah inti dari probity (Gazali et al, 2024). Setiap individu dan organisasi yang terlibat dalam proses pengadaan diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Dengan sistem pelaporan yang baik dan transparan, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, sehingga mendorong pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.

Dalam praktiknya, prinsip probity tidak terlepas dari beberapa unsur kunci lainnya. Salah satunya adalah keadilan, di mana semua peserta dalam pengadaan harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga sangat penting. Mematuhi aturan dan pedoman yang ada akan membantu mencegah penyimpangan yang dapat merugikan anggaran publik (Jensen & Meckling, 1976).

Akuntabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa, terutama di sektor publik. Pada intinya, akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik atau pihak yang berwenang. Dalam konteks pengadaan, akuntabilitas memastikan bahwa setiap proses, keputusan, dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat diaudit.

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, transparansi adalah salah satu prinsip utama akuntabilitas. Informasi terkait pengadaan harus tersedia untuk publik, termasuk proses pemilihan, keputusan yang diambil, dan penggunaan dana (Dewi, 2023). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi pengeluaran publik, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi.

Kedua, akuntabilitas juga terkait dengan pelaporan yang jelas dan tepat waktu. Setiap lembaga yang terlibat dalam pengadaan harus menyusun laporan pengeluaran dan hasil pengadaan yang mudah dipahami. Ini mencakup menyajikan informasi mengenai siapa yang terlibat dalam pengadaan, bagaimana prosesnya berjalan, dan apa hasilnya. Pelaporan yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya publik.

Di sinilah hubungan antara akuntabilitas dan probity menjadi sangat relevan. Probity, sebagaimana diuraikan sebelumnya, mencakup prinsip transparansi, integritas, dan kejujuran dalam semua proses pengadaan. Ketika prinsip-prinsip probity diterapkan secara konsisten, hal ini akan memperkuat akuntabilitas dalam pengadaan (Mustaufiq et al, 2024). Misalnya, jika seluruh tahapan pengadaan dilakukan dengan transparan dan jujur, maka pelaporan yang dihasilkan juga akan lebih tepat dan akurat, sehingga memfasilitasi akuntabilitas yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana

optimalisasi probity dalam pengadaan barang dan jasa di Polda Jatim dilakukan melalui aplikasi Puskeu Polri. Penelitian kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang lebih kaya dan beragam melalui interaksi langsung dengan informan, menganalisis persepsi dan pengalaman mereka dalam proses pengadaan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yakni wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai stakeholder yang terlibat, termasuk pihak Polda Jatim, pengelola pengadaan barang dan jasa, serta operator aplikasi Puskeu Polri. Wawancara akan dilakukan secara semi-struktural, di mana penulis memiliki daftar pertanyaan yang fleksibel, memungkinkan pengembangan diskusi sesuai dengan respons yang diberikan oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Jatim telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan praktik probity dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip probity seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi fokus utama dalam setiap proses pengadaan. Para informan menyatakan bahwa ketentuan yang jelas mengenai prosedur pengadaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam setiap tahap proses menjadi unsur yang paling mendukung implementasi probity.

Aplikasi Puskeu Polri berperan penting dalam hal ini. Dengan platform ini, semua dokumen terkait pengadaan dapat diakses secara elektronik, membuat proses menjadi lebih transparan dan efisien. Misalnya, sistem penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses setiap saat memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran. Hal ini sangat berharga dalam mengurangi risiko penyimpangan dan kolusi, yang sering kali menjadi tantangan di sektor publik.

Namun, meskipun praktik probity terus ditingkatkan, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam penerapan. Beberapa pegawai mengungkapkan bahwa kesadaran tentang pentingnya probity masih bervariasi di antara anggota tim. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pelatihan terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya dikenal, tetapi juga diimplementasikan dalam dokumen dan tindakan nyata. Penelitian juga menggali persepsi para stakeholder mengenai aplikasi Puskeu Polri dan kontribusinya terhadap proses pengadaan. Sebagian besar responden memberikan penilaian positif tentang aplikasi ini, menganggapnya sebagai alat yang meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan. Para pengguna mencatat bahwa aplikasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan membuat laporan, yang sebelumnya memakan waktu lebih lama ketika dilakukan secara manual.

Terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa pegawai melaporkan kesulitan teknis saat menggunakan aplikasi, seperti gangguan sistem dan kebutuhan akan pelatihan yang lebih intensif. Banyak yang merasa bahwa pelatihan yang ditawarkan kurang mendalam dan tidak mencakup semua aspek fungsional aplikasi, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam penggunaan. Meskipun aplikasi ini bermanfaat dalam hal efisiensi, kesulitan teknis tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan teknologi sangat bergantung pada dukungan pelatihan dan infrastruktur yang memadai.

Hubungan Antara Probity, Penggunaan Aplikasi, dan Akuntabilitas Pelaporan

Dari analisis data, terlihat adanya hubungan yang erat antara penerapan prinsip probity di Polda Jatim, penggunaan aplikasi Puskeu Polri, dan akuntabilitas pelaporan. Temuan menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi, setiap langkah dalam proses pengadaan menjadi lebih terlihat dan terdokumentasi dengan baik. Transparansi yang dihasilkan dari aplikasi memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk mengawasi dan memberikan input selama proses pengadaan berlangsung.

Adanya sistem yang terintegrasi meningkatkan akuntabilitas karena semua tindakan dan keputusan dapat diaudit dengan lebih mudah. Responden merasakan bahwa laporan pengadaan yang dihasilkan melalui aplikasi menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan penyimpangan. Dalam konteks ini, aplikasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan praktik probity dengan akuntabilitas, mengarah pada pengelolaan yang lebih baik.

Dari temuan dan diskusi ini, ada beberapa implikasi yang bisa diambil untuk pengembangan kebijakan dan praktik pengadaan barang dan jasa di Polda Jatim. Pertama, penting untuk menyediakan pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan bagi pengguna aplikasi Puskeu Polri. Pelatihan ini seharusnya tidak hanya fokus pada cara menggunakan aplikasi tetapi juga pada pentingnya praktik probity dalam pengadaan.

Kedua, peningkatan infrastruktur teknologi yang mendukung aplikasi harus dijadikan prioritas agar sistem berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran proses pengadaan. Hal ini mencakup pemeliharaan sistem dan dukungan teknis yang siap memberikan bantuan kapan saja diperlukan.

Dan terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar Polda Jatim melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan aplikasi dan praktik pengadaan secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa mereka tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Polda Jatim dapat semakin efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis optimalisasi probity dalam pengadaan barang dan jasa di Polda Jatim melalui aplikasi Puskeu Polri. Berdasarkan hasil penelitian, kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip probity, seperti transparansi dan akuntabilitas, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Aplikasi Puskeu Polri berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses pengadaan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Meskipun demikian, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kesulitan teknis yang dialami pengguna dan kebutuhan akan pelatihan yang lebih baik. Hubungan antara probity, penggunaan teknologi, dan akuntabilitas pelaporan ternyata sangat erat, di mana aplikasi ini membantu memastikan setiap keputusan dalam pengadaan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanti, M. T., Djasuli, M., & Harwida, G. A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. *Jurnal Pamator*, 9(1), 1-7

- Gazali, M., Ode, L., Islamy, S., Ikhsanuddin, D., Ikhsanuddin, D., & Ikhsanuddin, U. D. (2024). FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN. 12, 168–180.
- Iskandar, I. (2023). Pengadaan barang dan jasa pemerintah penggerak penting pertumbuhan ekonomi. Inspektorat Utama.
- Jusuf, R. A., Nagoi, G. B., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 12(1), 45-52
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas probity audit dalam mencegah kecurangan penyediaan barang/jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 353-368.
- Syukron, A. M. (2017). Analisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam proses pengawasan pengadaan barang/jasa. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(2)
- Utama, F. (2018). Probity audit atas pengadaan barang/jasa: Tantangan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Wicaksono, D., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Evaluasi pelaksanaan probity audit dalam rangka akuntabilitas pengelolaan sektor publik. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 417-427.
- Pencegahan, T., Dalam, K., Barang, P., & Jasa, D. A. N. (2024). Issn : 3025-9495. 5(11).
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java*. 16(3), 266–279.
- Yunaniah, L. L., Firmansyah, A., Trisakti, U., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). OPTIMALISASI PROBITY AUDIT UNTUK MENCEGAH KORUPSI DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG / JASA DI. 3(4), 233–242.